

## **ALASAN AMERIKA SERIKAT MENCABUT SANKSI EKONOMI TERHADAP MYANMAR**

**Indin Novita Sari<sup>1</sup>**  
**1402045030**

### **Abstract**

*This research comes from the main question namely, what is the background of the United States revoking economic sanctions against Myanmar. In this study the authors used descriptive methods, namely, data from books, journals, and other official websites. the purpose of this study was to find out the reason the United States lifted economic sanctions against Myanmar. to analyze case studies, the authors used the concepts of O'Donnell's democratic transition and Philies Schmiler. The results show that the reason the United States shows that the main reason for the United States to revoke economic sanctions against Myanmar is because of a series of political reforms and democratization in Myanmar, the change in Myanmar's political direction has influenced US foreign policy to remove the Myanmar economic sanctions imposed by the United States since in 1997 and the return of Aung Saan Suu Kyi in the government of Myaanmar.*

**Keywords:** *Military Junta, Economic Sanctions in Myanmar, Political Reformand Democratization*

### **Pendahuluan**

Menurut catatan sejarah Myanmar telah berada dalam kekuasaan junta sejak kudeta militer yang terjadi pada 2 Maret 1962 yang dipimpin oleh Jendral Ne Win hal tersebut merupakan awal runtuhnya demokrasi di Myanmar. Dalam masa pemerintahan rezim militer tersebut, Myanmar terus berada dalam kondisi yang semakin buruk, kondisi perekonomian yang tidak kunjung membaik hingga kasus pelanggaran HAM yang tinggi terus terjadi di Myanmar dan perpanjangan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah tidak menghentikan pemerintah untuk mundur dari kursi pemerintahan. Hingga sebaliknya pemerintah justru kembali melebarkan kekuasaan dengan mengambil alih seluruh aspek kehidupan masyarakat Myanmar. Selama masa pemerintahan junta militer menguasai Myanmar, negara ini dihadapkan dengan permasalahan yang sangat kompleks selain ekonomi, politik dan HAM pemerintah juga membatasai kebebasan terhadap pers atau media.

Tidak adanya kebebasan pers di Myanmar ditunjukkan dengan adanya larangan penulisan terkait urusan tentang masalah Hak Asasi Manusia dan tahanan politik, sehingga pada masa tersebut banyak surat kabar yang dilarang terbit karena dianggap melanggar aturan yang telah dibuat oleh junta militer. (Devi Aprianti. Jurnal Universitas Riau) Kondisi tersebut yang kemudian mendorong para aktivis yang

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maulwarman. E-mail : indinnovitasari@gmail.com

terdiri dari mahasiswa dan tokoh agama melakukan demonstrasi yang direspon secara keras oleh pemerintah junta. Demonstrasi tersebut terjadi pada tanggal 8 Agustus 1988 yang membentuk perlawanan terhadap Jendral Ne Win dan menuntut sistem pemerintahan demokrasi. aksi tersebut dilatar belakangi kegagalan pemerintah junta membentuk stabilitas ekonomi dan melahirkan krisis ditahun 1987. (Sat Myat Tin dan Jossie Elias, 2012)

Akibat dari aksi demonstrasi tersebut terjadi pembunuhan massal yang menyebabkan 3000 demonstran tewas akibat serangan dari pemerintah junta aksi tersebut terjadi pada 8 Agustus 1988, hal tersebut telah menodai kredibilitas pemerintahan Ne Win ditambah dengan penahanan pemimpin *National League for Democracy* (NLD) Aung San Suu Kyi menambah daftar pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Pemerintahan Junta. (Mohamad Faisol Keling, dkk, 2010). Penangkapan Aung San Suu Kyi disebabkan karena ia mulai melakukan gerakan politik melalui pengiriman surat resmi, meminta pemilihan umum dan menuntut pemerintahan yang demokrasi, akan tetapi hal tersebut ditentang oleh pemerintah junta yang menyebabkan Aung San Suu Kyi di tahan oleh pemerintah Myanmar.

Berkuasanya rezim militer telah mengambil alih seluruh bagian kehidupan sosial di Myanmar, pemerintah junta lebih mementingkan menghabiskan dana yang sangat besar untuk pengeluaran dalam bidang kemiliteran dibandingkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di Myanmar. Dampak yang ditimbulkan dari otoritasme yang diterapkan oleh pemerintah junta juga mengakibatkan kemiskinan dan kelaparan yang diderita oleh rakyat Myanmar. Melihat kondisi internal yang terjadi di Myanmar, hal tersebut menjadi sorotan dunia internasional khususnya negara-negara Barat seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, Uni Eropa menjatuhkan sanksi senjata pada tahun 1996 terhadap Myanmar dikarenakan rezim otoriter Myanmar yang terus menyebabkan pelanggaran HAM yang tinggi, sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM dan negara pelopor demokrasi, Amerika Serikat pun melakukan penjatuhan sanksi ekonomi berupa embargo pada 20 Mei 1997 oleh Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Myanmar di tahun 1997 tersebut.

Sanksi tersebut berupa larangan investasi oleh warga Amerika Serikat ke Myanmar, sanksi tersebut dijatuhkan berkenaan dengan belum teralisasinya pemerintahan yang demokrasi, transparan dan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar. Kekejaman pemerintah junta tidak berhenti sampai disitu. Pada tahun 2003, pemerintah junta melakukan serangan konvoi partai NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi di Depayin. Sehingga pada 28 Juli 2003, Presiden George W. Bush mengeluarkan *Executive Order* (EO) yang memberlakukan sanksi terhadap Myanmar sesuai dengan *Burmese Freedom and Democracy Act* (BFDA). *Executive Order* 13310, berisi draft pelarangan impor produk dari Myanmar dan ekspor jasa keuangan ke Myanmar, serta membekukan aset State Peace and Development Council (SPDC) dan tiga lembaga keuangan perdagangan luar negeri Myanmar serta memperpanjang pembatasan visa untuk pejabat Myanmar. Pemerintah Amerika Serikat juga melarang impor semua batu permata dari Burma, sanksi ini merupakan bagian dari program untuk menekan junta militer yang telah mengabaikan pemilihan demokrasi dan

pelanggaran HAM yang dilakukan oleh junta militer terhadap kelompok minoritas di Myanmar. Setidaknya tercatat terdapat 7 etnis di Myanmar yaitu,

1. Bamar/ Birma (Burma) 68%, merupakan etnis mayoritas di Myanmar 2/3 dari total warga di Myanmar merupakan etnis Burma. Beragama Buddha menghuni sebagian besar wilayah Myanmar kecuali wilayah pedesaan.
2. Karen 7%, etnis yang beragama Buddha dan Kristen menghuni wilayah pegunungan yang berbatasan dengan Thailand.
3. Arakan (Rakhine) 4%, etnis yang beragama Buddha dan tinggal di perbukitan di Myanmar Barat.
4. Kachin 3%, etnis yang mayoritas beragama Buddha tersebar di Cina dan India.
5. Chin 2%, etnis yang beragama Kristen menghuni perbatasan India.
6. Mon 2%, etnis yang beragama Buddha menghuni kawasan Myanmar bagian Selatan dekat dengan perbatasan Thailand.
7. Rohingya 4 %, etnis yang beragama Muslim (Islam) yang tinggal di Myanmar bagian Utara Rakhine sebagian dari etnis ini telah mengungsi ke Bangladesh dan Thailand.

#### **Gambar negara yang berbatasan dengan Myanmar**



(<http://english.freemap.jp>)

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah junta disebabkan oleh diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah junta. Dalam kursipemerintahan Myanmar para petinggi negara merupakan orang-orang yang berlatarbelakang militer selain itu keterlibatan politik juga didominasi oleh etnis Burma yang merupakan etnis mayoritas. Hal tersebut membawa sebagian etnis non Burma merasa dikucilkan, tidak sedikit dari mereka beranggapan bahwa penjajahan Inggris lebih baik dibandingkan pemerintahan yang dijalankan oleh etnis mayoritas karena pada saat Inggris menjajah banyak dari mereka yang mendapatkan pekerjaan di dalam administrasi Myanmar dan mendapatkan

pendidikan yang lebih tinggi serta pembangunan identitas yang lebih dari etnis minoritas. (Lex Rieffel, 2012)

Pelanggaran HAM yang dilakukan junta tidak berhenti sampai di situ saja terjadi tindakan kekerasan pemerintah junta terhadap demonstran damai pada bulan September 2007, protes tersebut dimulai pada 19 Agustus 2007 setelah rezim militer menaikkan harga BBM tanpa peringatan hingga 500% pada 15 Agustus 2007 yang mana secara efektif hal tersebut menaikkan harga makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Demonstrasi ini dipimpin oleh kelompok aktivis pro-demokrasi pemerintah merespon hal tersebut dengan melakukan serangan brutal terhadap demonstran damai tersebut. Dalam demonstran tersebut pemerintah menangkap ratusan orang yang terlibat dalam aksi damai tersebut, garis waktu pembontakan yang didominasi oleh para Biksu Budha terjadi dari bulan Agustus sampai bulan Oktober. Setidaknya terdapat 100.000 (2007 Uprising in Burma. *Saffron Revolution in Burma* diakses melalui <http://burmacampaign.org.uk/about-burma/2007-uprising-in-burma/>) biksu dan warga sipil berbaris melakukan aksi demonstrasi.

Gelombang demokrasi yang tidak terkontrol membuat pemerintah mematikan koneksi internet di Burma untuk menghentikan arus berita dan gambar yang keluar. Saat demonstrasi semakin besar, rezim militer terus meningkatkan keamanan di kota-kota utama di Myanmar dan siap untuk menggagalkan aksi pro-demokrasi tersebut. Demo yang melibatkan ribuan bikshu kemudian meletus diberbagai kota di Myanmar, para warga sipil akhirnya juga banyak yang mengikuti. Pemerintah Junta Militer melakukan aksi kekerasan dalam membubarkan demo-demo besar ini, Pagoda-pagoda disegel, para demonstran ditahan, dan senjata digunakan untuk membubarkan massa. Banyak biksu ditahan, beberapa diyakini disiksa dan meninggal dunia. Sepanjang gelombang protes terjadi belasan orang diyakini menjadi korban.

Hal tersebut membuat hubungan bilateral Amerika Serikat dan Myanmar semakin tegang. Amerika Serikat mengambil langkah untuk melancarkan aksinya untuk mengisolasi Myanmar, Amerika Serikat memilih untuk menambah penjatihan sanksi pada 27 September 2007, Departemen Keuangan Amerika Serikat menunjuk 25 pejabat senior pemerintah Myanmar sebagai subjek atas pemblokiran aset dalam *Executive Order* 13310. Pada 18 Oktober 2007, Presiden George W. Bush mengumumkan *Executive Order* 13448, memperluas kewenangan untuk memblokir aset individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dan korupsi publik (Presidential Documents. *Blocking Property and Prohibiting Certain Transactions Related to Burma*, Executive Order 13448 of October 18, 2007)

Sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terus diperketat ditahun 2008 pemerintahan Bush menutup celah dengan diberlakukannya undang-undang yang dikenal *The Tom Lantos Block Burmese JADE (Junta's Anti-Democratic Efforts) (The Ban on Burma Ruby and Jade: Latest News*, Diakses melalui <https://www.ajsgem.com/articles/ban-burma-ruby-and-jade-latest-news.html>, pada tanggal 12 Februari 2018). Pada tahun 2010, terjadi reformasi politik di Burma dimana pemerintahan sipil baru yang dipimpin oleh Presiden Thein Sein mulai

melakukan serangkaian reformasi yang berkelanjutan. Melihat kondisi Myanmar yang terus melakukan serangkaian perubahan dan reformasi politik, Amerika Serikat mulai memulihkan hubungan diplomatik dengan Myanmar dengan menunjuk duta besar untuk Burma. Desember 2011, Hillary Clinton menjadi Menteri Luar Negeri pertama Amerika Serikat yang mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan Presiden Thein Sein.

Pada bulan Juni 2012, Dereck Mitchell menjadi Duta Besar pertama Amerika Serikat untuk Myanmar setelah 22 tahun kedua negara tersebut menarik masing-masing Duta Besar mereka Aung San Suu Kyi berkunjung ke Washington dan bertemu dengan Presiden Barrack Obama membahas kelanjutan sanksi ekonomi tersebut. Hingga diakhir masa pemerintahannya, Presiden Barrack Obama mencabut semua sanksi ekonomi terhadap Myanmar pada tanggal 7 Oktober 2016. Melalui *Executive Order* namun tidak untuk sanksi senjata karena dikhawatirkan kekuatan junta masih berkuasa di Myanmar.

Oleh karena itu, tulisan ini berupaya menjelaskan alasan Amerika Serikat Mencabut Sanksi Ekonomi terhadap Myanmar dengan menggunakan konsep Transisi Demokrasi.

### **Kerangka Dasar Teori atau Konsep**

#### ***Konsep Transisi Demokrasi***

Proses perubahan rezim dari rezim non-demokrasi menjadi rezim demokrasi sering kali disebut dengan transisi demokrasi. O'Donnell dan Schmitter menjelaskan bahwa proses transisi demokrasi merupakan sebuah *interval* atau jarak antara rezim politik non-demokrasi dengan rezim politik demokrasi (Guillermo O'Donnell dan Phillippe.C.Schmitter, 1986). Sebuah rezim yang sedang berada pada masa transisi demokrasi akan mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupan pemerintahannya maupun kehidupan sosial masyarakat, dalam hal ini O'Donnell dan Schmitter menjelaskan bahwa transisi demokrasi secara umum memiliki tahapan-tahapan tertentu, walaupun tidak semua negara akan melewati tahapan atau fase yang sama dikarenakan setiap negara pasti memiliki karakteristik tahapan yang berbeda dalam menjalankan proses transisi demokrasi.

Namun proses transisi demokrasi dapat ditarik menjadi garis linier satu tahapan berupa:

1. Diawali dengan runtuhnya rezim otoriter yaitu, peralihan kekuasaan dari kekuasaan otoriter ke kekuasaan demokratik atau dari sistem otoriter ke sistem demokratik.
2. Oposisi menyiapkan fase pra-transisi demokrasi yaitu, kelompok-kelompok yang mendukung rezim demokrasi telah mempersiapkan dan menetapkan arah politik yang demokrasi.
3. Dibukanya liberalisasi oleh pihak oposisi yaitu, proses mengaktifkan hak-hak politik yang melindungi individu dan kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara atau pihak ketiga. Dalam tahap ini ditandai adanya kekuasaan untuk membuka peluang terjadinya kompetisi politik, dilepaskannya tahanan politik dan diberikannya ruang kebebasan pers.

4. Penataan awal serta lahirnya rezim demokrasi yaitu, titik awal atau interval (selang waktu) antara rezim otoriter dengan rezim demokrasi. Transisi awal dengan runtuhnya rezim otoriter lama yang kemudian diikuti dengan pengesahan lembaga politik baru di bawah payung demokrasi, pada tahap ini ditandai dengan adanya pemilu.
5. Konsolidasi demokrasi sebagai (proses) penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama-sama secara padu memfasilitasi demokratisasi politik. konsolidasi demokrasi menekankan pada proses pencapaian legitimasi yang kuat dan dalam, sehingga semua aktor politik yang signifikan, baik pada level massa maupun elite, percaya bahwa pemerintahan demokratis adalah yang paling tepat bagi masyarakat mereka. Unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi yaitu:
  1. Lembaga atau institusi politik, baik partai politik, elit, kelompok-kelompok kepentingan mau pun masyarakat politik.
  2. Adanya kesepakatan bersama menyangkut “nilai-nilai politik” yang bisa mendekati dan mempertemukan berbagai elemen. Dalam transisi demokrasi pasti terjadinya liberalisasi yang akan diakhiri dengan instalasi demokrasi. (Scoot Mainwaring, 1989)

Adanya kesepakatan bersama menyangkut “nilai-nilai politik” yang bisa mendekati dan mempertemukan berbagai elemen. Dalam transisi demokrasi pasti terjadinya liberalisasi yang akan diakhiri dengan instalasi demokrasi. Adanya kesepakatan bersama menyangkut “nilai-nilai politik” yang bisa mendekati dan mempertemukan berbagai elemen. Dalam transisi demokrasi pasti terjadinya liberalisasi yang akan diakhiri dengan instalasi demokrasi Samuel Huntington (Samuel Huntington, 1991)

### **1. Transformasi**

Terjadi ketika elit yang berkuasa memelopori proses perwujudan demokrasi. Dalam transformasi, pihak-pihak yang berkuasa dalam rezim otoriter mensponsori perubahan dan memainkan peran yang menentukan dalam mengakhiri rezim itu dan mengubahnya menjadi sebuah sistem yang demokratis.

### **2. Replacement (pergantian)**

Terjadi ketika kelompok Oposisi memelopori proses perwujudan demokrasi di mana kemudian Rezim Otoriter tumbang atau digulingkan. Replacement merupakan sebuah transisi yang matang dan lemah, proses ini sangat tergantung dengan kontinuitas perjuangan dari mereka yang memiliki komitmen yang kuat dengan pembangunan demokrasi. Dan dalam kasus Indonesia dan juga seperti Mesir replacement ini menampilkan wajah yang tidak sempurna. Namun jika Indonesia dan Mesir memiliki cukup banyak tersedia kelompok sosial yang konsen dengan demokrasi, maka replacement ini akan menjadi matang. Namun apabila kelompok sosial itu sedikit maka berpeluang besar bahwa Transisi Demokrasi ini berbalik arah menjadi Otoritarianisme Baru.

### **3. Transplacement**

Terjadi jika demokratisasi merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok pemerintah dan kelompok oposisi. Kelompok konservatif dalam rezim berada pada posisi yang seimbang dengan pemerintah, tetap pemerintah sendiri hanya bersedia merundingkan perubahan, dan tidak mau

memprakarsai perubahan rezim. Hal ini sangat berbeda dengan adanya dominasi kelompok konservatif yang menimbulkan replasemen.

Transisi demokrasi memiliki bentuk-bentuk yang berbeda, perbedaan dari bentuk tersebut akan terlihat saat bagaimana runtuhnya rezim otoriter di suatu negara. Bentuk transisi yang dimaksud adalah *Reforma Pactada* dan *Ruptura Pactada*. *Reforma Pactada* merupakan suatu bentuk transisi demokrasi yang menekankan pada konsolidasi untuk menekan rezim sebelumnya dan aktor politik yang memiliki visi untuk menentukan rezim yaitu rezim demokrasi. Konsolidasi tersebut menyertakan aktor politik pada rezim sebelumnya dan aktor politik yang memiliki visi untuk membentuk suatu rezim baru dalam pemerintahan suatu negara. Berbeda dengan *Reforma Pactada*, *Ruptura Pactada* melakukan cara yang telah yang lebih radikal dalam upaya membentuk suatu tatanan rezim baru. Hal tersebut dilakukan dengan cara menjatuhkan kekuasaan dari rezim sebelumnya dengan cara yang lebih radikal, serta menyingkirkan seluruh aktor politik lama dalam pemerintahan. Kemudian aktor-aktor tersebut akan digantikan oleh orang-orang baru yang pemikirannya terbebas dari cara pandang aktor rezim sebelumnya untuk membentuk suatu tatanan rezim demokrasi. (JM Maravel dan Julian Santamaria, 1992)

### **Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif dimana penulis menjelaskan atau menggambarkan keadaan dan situasi yang dapat memberikan penjelasan Alasan Amerika Serikat Mencabut Sanksi Ekonomi Terhadap Myanmar. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan dan hasil pencarian data melalui internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah telaah pustaka. Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis data kualitatif *content analysis*, yaitu penulis menggunakan data sekunder, kemudian menggunakan teori untuk menggambarkan suatu fenomena atau kejadian yang penulis teliti.

### **Hasil Penelitian**

Sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap Myanmar merupakan salah satu upaya Amerika Serikat untuk menekan pemerintahan junta di Myanmar. Konflik internal yang terjadi di Myanmar menimbulkan banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar, bahkan kasus pelanggaran HAM tersebut disebabkan oleh pemerintah junta sendiri. Sehingga hal tersebutlah yang kemudian mendasari Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Myanmar. Namun sejak tahun 2010 Myanmar mulai melakukan serangkaian reformasi politik yang kemudian mendorong Amerika Serikat untuk mengubah arah kebijakan luar negeri dengan melonggarkan sanksi-sanksi terhadap Myanmar. Adapun beberapa alasan yang melatar belakangi Amerika Serikat mencabut sanksi ekonomi terhadap Myanmar diantaranya:

#### ***Runtuhnya Rezim Otoriter di Myanmar***

Perubahan arah politik Myanmar telah telah dijalankan oleh pemerintah Myanmar dimana perubahan arah politik Myanmar telah membawa Myanmar dalam fase transisi demokrasi yang telah dilakukan oleh kepemimpinan Jendral Thein Sain. Pemerintah Myanmar mulai melakukan serangkaian reformasi politik dan

demokratisasi, sejak kepemimpinan Jendral Thein Sein pada Januari 2011 untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, pemerintah Myanmar menyelenggarakan pemilu yang adil. Myanmar memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu pada tanggal 1 April 2012 sebagai wujud demokratisasi.

Pemilihan bersejarah terjadi di tahun 2012, dimana pilihan umum tersebut dimenangkan oleh partai oposisi NLD, juru bicara partai NLD menepatkan 43 anggota partai dan memenangkan kursi di parlemen termasuk Aung San Suu Kyi. Kemunculan Aung San Suu Kyi di parlemen Myanmar menandai perubahan besar dinegara tersebut selama hampir lima dekade negara tersebut dipimpin oleh rezim militer, NLD memenangkan 43 dari 45 kursi parlemen dalam pemilihan ini. Pemilihan umum ini dilaksanakan secara adil dan transparan serta dihadiri oleh pantauan komunitas internasional yang merupakan salah satu upaya dari rezim militer untuk melakukan demokratisasi. Kemenangan partai NLD telah mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat yang cukup besar.

Ternyata tidak hanya itu saja, dalam pemerintahannya Thein Sein juga mulai mendukung para pemimpin militer muda untuk melakukan perubahan dalam mereformasi politik yang lebih baik. Bahkan upaya lainnya yang luar biasa yaitu, mencabut larangan terhadap partai NLD dalam mendukung pemimpin Aung San Suu Kyi untuk tetap bertahan dalam kepemimpinannya di Myanmar. Thein Sein berupaya untuk membawa Suu Kyi pada barisan terdepan dalam mengatasi persoalan di bidang sosial, ekonomi, politik, serta mengubah citra negaranya menuju negara yang lebih mandiri dan berkembang. Begitu juga dengan kebijakan luar negerinya, yang lebih menekankan pada sistem liberalisasi yang lebih terbuka terhadap perdagangan bebas, serta melanjutkan hubungan kerjasama dengan negara-negara luar dalam bidang investasi

Perubahan yang terjadi di Myanmar menegaskan bahwa kepemimpinan Jendral Thein Sein pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya demokratisasi, perubahanpun telah dilakukan oleh para pemimpin militer di Myanmar. Bahkan rezim militer yang kuat tersebut mampu melakukan reformasi politik tersebut semata-mata untuk mewujudkan demokrasi di Myanmar. Dalam pemilihan umum tersebut, Aung San Suu Kyi mendapatkan kursi pemerintahan yang sebelumnya ditolak oleh pemerintahan junta. Kehadiran Aung San Suu Kyi dalam parlemen di Myanmar merupakan langkah bagi pemerintah membuktikan kesediannya menerapkan pemerintahan yang demokrasi.

Dalam kampanyenya, Aung San Suu Kyi menjanjikan akan memperbaiki segala aturan yang memberatkan bagi rakyat Myanmar diantaranya hukum, perdamaian, rekonsiliasi nasional, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan melakukan amandemen konstitusi yang dibuat junta militer agar lebih demokrasi. Perubahan besar yang dilakukan Myanmar berdampak pada keseluruhan aspek kehidupan masyarakat Myanmar termasuk pembangunan dalam negeri. Reformasi politik ini juga telah mendapatkan aspirasi dan dukungan dari dunia Internasional salah satunya Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan sistem pemerintahan yang demokrasi sangat mendukung perubahan rezim di Myanmar.



Amerika Serikat terus memberikan dukungan dengan kembalinya Aung San Suu Kyi dalam keterlibatan politik di Myanmar, salah satu wujud dukungan yang diberikan Amerika Serikat terhadap Myanmar ialah Amerika Serikat menegaskan akan segera menunjuk Duta Besar Amerika Serikat untuk Myanmar setelah hampir 20 tahun kedua negara ini menarik masing-masing duta besar mereka. Sebelumnya, tahun 2011 Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan presiden Thein Sein sebagai wujud apresiasi atas perubahan rezim yang telah terjadi di Myanmar. Amerika Serikat menilai bahwa reformasi politik yang dilakukan oleh Myanmar merupakan langkah awal bagi Amerika Serikat untuk meningkatkan kembali hubungan kedua negara tersebut selama beberapa tahun kebelakang kurang baik ini.

#### ***Kembalinya Aung San Suu Kyi dalam pemerintahan Myanmar***

Kembalinya Aung San Suu Kyi dalam pemerintahan Myanmar telah menegaskan bahwa pemerintah Myanmar telah benar-benar meninggalkan rezim militeristik tersebut. Tidak hanya Aung San Suu Kyi pembebasan tahanan politik juga terjadi pada para pendukung pro demokrasi telah dibebaskan oleh pemerintah Myanmar. Dalam transisi demokrasi tersebut catatan Hak Asasi Manusia mencatat bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan junta militer begitu buruk, namun kini kasus pelanggaran HAM menjadi lebih baik sebagaimana yang telah dikatakan oleh penasihat hukum Presiden Thein Sein, Sit Aye bahwa “Konstitusi dan pemerintahan telah menjamin Hak Asasi Manusia dengan membentuk Komite Hak Asasi Manusia”.

Pada masa junta militer buruh tidak memiliki kebebasan untuk menuntut kesejahteraan saat ini, namun dengan runtuhnya rezim otoriter yang kini beralih ke masa transisi demokrasi buruh justru diberikan kebebasan untuk mendirikan serikat kerja dan kebebasan untuk melakukan unjuk rasa yang pada masa junta hal tersebut sangat ditentang oleh pemerintah junta. Pemerintah Myanmar juga berinisiatif untuk mempromosikan Hak dan Praktik Buruh Dasar di Myanmar. Pemerintah Amerika Serikat bekerjasama dengan Myanmar dan mitra di masyarakat internasional untuk mengembangkan dan mendukung Myanmar memperbaiki hak-hak buruh yang mendasar dan memberikan landasan yang kuat untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan insitusi ini dimaksudkan untuk membantu memoderenisasi kode ketenagakerjaan Myanmar, memperbaiki kepatuhan terhadap standar buruh internasional dan mendorong dialog yang kuat antar pemerintah, bisnis, buruh dan masyarakat sipil.

Dalam perubahan yang terjadi di Myanmar hal tersebut yang kemudian mendorong Amerika Serikat untuk mengurangi beberapa sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap Myanmar. Hingga akhirnya pada tahun 2012, melalui menteri luar negerinya Amerika Serikat menyatakan akan mengurangi sanksi ekonomi terhadap Myanmar dengan mengizinkan impor barang-barang dari Myanmar. Dua raksasa minuman ringan, Coca-Cola dan Pepsi-Co kembali ke Myanmar untuk pertama kalinya. Kemudian disusul dengan perusahaan energi ConocoPhillips dan Chevron yang juga mulai melakukan peluang investasi di sana, geliat ekonomi juga nampak dengan kesepakatan yang dicapai MasterCard dan Visa dengan bank-bank Myanmar untuk pengguna kartu kredit mereka. Dengan kian

longgarnya sanksi yang diberikan Amerika Serikat terhadap Myanmar, tidak menutup kemungkinan bank dapat melakukan remitansi dari dan ke bank Myanmar.

Kemudian pada tahun 2016 tepatnya pada tanggal 14 September 2016 Aung San Suu Kyi bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama, dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak membahas kelanjutan sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat selama hampir 20 tahun tersebut. Kunjungan bersejarah Aung San Suu Kyi sebagai penasihat negara dan Menteri Luar Negeri adalah bukti perubahan luas yang telah dilakukan Myanmar. Dalam kesempatan ini Presiden Obama menyampaikan telah memutuskan untuk membuat penyesuaian yang signifikan untuk melanjutkan proses reformasi politik terhadap Myanmar di antaranya :

1. Mencabut Darurat Nasional atau sanksi ekonomi

Presiden Barrack Obama akan segera menghentika atau mencabut sanksi terhadap Myanmar yang telah ada sejak tahun 1997, melihat kemajuan Myanmar yang luat biasa terhadap konsolidasi demokrasi dan Amerika Serikat akan terus mendukung dan membantu pemerintahan baru mewujudkan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Sanksi ekonomi dan keuangan yang dikenakan pada Myanmar dibawah darurat nasional dimaksudkan untuk menekan transisi menuju demokrasi. Dengan mencabut sanksi ekonomi ini, semua pembatasan yang dilakukan oleh Departemen Aset Keuangan Luar Negeri tidak berlaku lagi, termasuk pemindahan daftar individu khusus yang ditunjuk dan daftar individu-individu yang di blokir khusus oleh Amerika Serikat.

2. Mengembalikan manfaat *Generilized of Preferences (GPS)*

Presiden Obama menandatangani sebuah pengumuman yang menunjuk Myanmar telah memenuhi syarat untuk mendapatkan keuntungan perdagangan berdasarkan program profensi perdagangan GPS. Amerika Serikat yakin bahwa langkah ini berpotensi memberikan kontribusi penting bagi pemerintahan yang baru. Menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan disebuah negara dengan pendapatan perkapita diperkirakan mencapai \$1.280, angka terendah kedua di ASEAN dan Asia Timur. Langkah ini berlaku pada tanggal 13 November 2016 setelah nota pemeberitahuan 60 hari kongres.

3. Membentuk kemitraan Amerika Serikat- Myanmar

Presiden Obama dan Aung San Suu Kyi meluncurkan kemitraan Amerika Serikat-Myanmar untuk meningkatkan kerjasama. Agar saling menghormati dalam kepentingan bersama termasuk peresmian pemerintahan yang baru. Kemitraan ini akan menyediakan kerangka kerja untuk memajukan prioritas utama dalam hubungan bilateral kedua negara dan menciptakan mekanisme kerjasama diberbagai bidang termasuk dalam politik dan diplomatik, hubungan perdagangan dan ekonomi, sains dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, lingkungan dan kesehatan, pertahanan dan keamanan, perlindungan dan promosi hubungan supremasi hukum hak asasi manusia. Untuk mendukung kemitraan Amerika Serikat-Myanmar, kedua negara akan mengadakan pertemuan tahunan yang dipimpin oleh Departemen Luar Negeri Myanmar dengan tuan rumah bergantian antara kedua negara. Adapun beberapa bidang tematik utama dapat mencakup:

- a. Mendukung uapaya Myanmar untuk mencapai perdamaian dan rekonsolasi
- b. Membngun kemitraan ekonomi dan kormesial yang kuat

- c. Mempromosikan pembangunan ekonomi inklusif yang menguntungkan rakyat
- d. Mendorong transisi demokrasi Myanmar dan dukungan untuk perlindungan hak asasi manusia dan peraturan hukum
- e. Membangun kualitas pendidikan lebih baik lagi
- f. Bekerjasama dalam isu regional, multilateral dan global.

4. Memperluas hubungan *People to People*

Amerika Serikat berusaha untuk memperkuat hubungan individu dengan Myanmar dengan memperbanyak hubungan antar anak muda di kedua negara ini, termasuk melalui Prakarsa Pemimpin Muda Asia Tenggara Presiden. Menyadari bahwa 55% populasi Myanmar berusia dibawah 30 tahun Amerika Serikat bertujuan untuk melibatkan generasi muda pemimpin generasi berikutnya melalui program pertukaran dengan Amerika Serikat, termasuk dengan memberikan sumbangan 50% untuk menandai pendidikan yang mendorong lebih banyak mahasiswa Myanmar belajar di Amerika Serikat. Amerika Serikat juga akan menamhakan kapasitas guru bahasa Inggris di Myanmar melalui pelatihan langsung untuk 1.500 guru pendidik bahasa Inggris. Selain itu Amerika Serikat juga akan mengeluarkan Program Kepemimpinan Pengunjung Internasional, program pertukaran profesional utama Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang berfokus melibatkan peserta Myanmar mengenai federalisme yang demokrasi.

5. Memperdalam Keterlibatan Ekonomi *Bilateral*

Amerika Serikat dan Myanmar menyadari bahwa kedua negara ini harus meningkatkan ekonomi bilateral dan bertukar pandangan mengenai undang-undang dan praktik yang mempengaruhi arus investasi bilateral dan investasi asing termasuk unsur-unsur dari suatu pinjaman investasi bilateral standar tinggi.

Sehingga dalam pertemuan kedua negara tersebut yang telah di sampaikan baik dari Presiden Obama maupun Aung San Suu Kyi, Amerika Serikat akan segera mencabut semua sanksi yang telah di jatuhkan terhadap Myanmar. Secara resmi pada tanggal 7 Oktober 2016 Presiden Amerika Serikat resmi mencabut semua sanksi ekonomi terhadap Myanmar melalui *Executive Order* 13047,13310,13448,13464,13619,13651 dan kini semua sanksi ekonomi dan keuangan dikelola oleh *Office of Foreign Assets Control* (OFAC) kini resmi dicabut, Sebagai hasil dari *Executive Order* Presiden Obama pada tanggal 7 Oktober 2016, terdapat beberapa perubahan berikut yang segera berlaku:

1. Semua individu dan entitas pada Daftar Warga Negara Tertentu dan Orang-orang yang Ditunjuk Khusus (Daftar SDN) yang terdaftar dalam “Program Sanksi Birma” dicabut, dan semua harta benda atau kepentingan dalam properti yang diblokir di bawah program tidak diblokir. Daftar SDN adalah sejumlah individu dan perusahaan, yang secara berkala ditunjuk oleh OFAC, yang asetnya diblokir dan dengan mana transaksi dilarang oleh Amerika Serikat.
2. Persyaratan pelaporan untuk investasi baru di Myanmar yang sebelumnya merupakan syarat untuk investasi baru \$500.000 berdasarkan persyaratan pelaporan investasi penanggung jawab Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sekarang menjadi sukrela.

3. Larangan impor batu giok dan batu rubi asal Myanmar ke Amerika Serikat kini resmi dicabut.
4. *The Financial Crimes Enforcement Network* (FinCEN) memberikan pelonggaran atau pengecualian administratif untuk menggunakan larangan lembaga keuangan Amerika Serikat untuk menjaga rekening koresponden bank Myanmar. FinCEN telah menetapkan Myanmar menjadi “yuridiksi keprihatinan pencucian uang primer” dibawah pasal 311 undang-undang PATRIOT Amerika Serikat. Meski demikian lembaga keuangan Amerika Serikat dapat memberikan layanan kepada bank-bank Myanmar yang sesuai dengan *due diligence* yang sesuai persyaratan. Suspensi FinCEN didasarkan pada temuan bahwa Myanmar telah membawa kemajuan dalam memperbaiki anti-uangnya (rezim pencucian uang)
5. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat sekarang dapat beroperasi di Myanmar dengan pembatasan yang jauh lebih sedikit meskipun semua perusahaan yang beroperasi di Myanmar harus tetap mengikiti embargo senjata yang belum dicabut dan juga ekspor lainnya yang dikontrol dan harus tetap memenuhi peraturan anti penyelundupan dan anti pencucian uang Amerika Serikat.

Terkait dengan hal tersebut, terdapat tiga hal positif yang dihasilkan demokrasi Myanmar di dalam negerinya. Pertama, perubahan iklim politik, jika sebelumnya militer semua aktivis politik yang dinilai membahayakan kekuasaan kini sebagian dari mereka telah dibebaskan, setidaknya tahanan politik telah dibebaskan, termasuk Aung San Suu Kyi. Kedua, catatan hak asasi manusia yang dimasa junta militer begitu buruk kini telah menjadi lebih baik sebagaimana dikatakan oleh penasihat hukum Presiden Thein Sein, Sit Aye bahwa “Konstitusi dan pemerintahan baru telah menjamin promosi hak-hak asasi manusia dengan membentuk Komisi Hak Asasi Manusia”. Ketiga, para buruh yang dimasa junta militer tidak memiliki kebebasan untuk menuntut kesejahteraan saat ini justru diberikan kebebasan untuk mendirikan serikat pekerja dan kebebasan untuk melakukan unjuk rasa.

Perubahan-perubahan besar yang terjadi di Myanmar tentunya diharapkan oleh banyak pihak terutama bagi masyarakat Myanmar sendiri yang telah menyuarakan sistem pemerintahan sejak lama.

### **Kesimpulan**

Terdapat 2 hal yang mendasari Amerika mencabut sanksi ekonomi terhadap Myanmar pertama, runtuhnya rezim otoriter di Myanmar, dimana terjadi pemilu untuk pertama kalinya di Myanmar pada tahun 2012 dimana ditahun-tahun sebelumnya negara ini dikuasai oleh pihak militer. Kedua pembebasan tahanan politik dan kembalinya Aung Saan Suu Kyi dalam pemerintahan Myanmar telah membuktikan bahwa Myanmar telah menorehkan sejarah baru dinegaranya dengan mengizinkan Aung Saan Suu Kyi kembali dalam kursi pemerintahan. Hal tersebut yang kemudian mendasari Amerika Serikat untuk menghentikan sanksi ekonomi terhadap Myanmar. Hingga akhirnya pada tanggal 7 Oktober 2016 melalui *Executive Order* Presiden Amerika Serikat Barrack Obama mencabut semua sanksi ekonomi yang dijatuhkan terhadap Myanmar kini secara resmi telah di cabut.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Guillermo O' Donnell & Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan ketidak pastian*, Jakarta: LP3ES. 1993

JM Maravel dan Julian Santamaria, 'Perubahan Politik di Spanyol dan Prospek bagi Demokrasi', dalam Guillermo O' Donnell, et al., *Transisi Menuju Demokrasi: Kasus Eropa Selatan*, (Jakarta: LP3ES, 1992) Hlm. 113

Rieffel, Lex. *Myanmar/ Burma : Inside Challenges Outside Interest* (Washington DC, Booking Institution Press)

Smith, Martin. 2007. *And State of Stife: The Dinamic of Ethnic Conflict in Burma*. Washington: east-west center

### **Jurnal**

Mustavidy Anggara dan Tri Joko Waluyo. " *Motivasi Amerika Serikat Menjatuhkan Embargo Ekonomi Terhadap Myanmar Tahun 2007*" Universitas Riau diakses pada [www.e-jurnal.com/2015/09/motivasi-amerika-serikat-menjatuhkan.htm](http://www.e-jurnal.com/2015/09/motivasi-amerika-serikat-menjatuhkan.htm)

Keling, Mohamad Faisol, dkk. 2010. " *Historical Approach to Myanmar's Democratic Procces*. Journal of Asia Pasific Studies. Vol. 1. No. 2

Sean Tumell. 2011. " *Myanmar's Fifty-Year Authoritarin Trap*" diakses pada, <https://jia.sipa.columbia.edu/myanmars-fifty-year-authoritarian-trap>

*The Invorment of U.S- Myanmar Relations Processes, Reasons and Prospects*. 2010. Asia Paper diakses pada [http://isdpeu/content/uploads/publications/2010\\_song\\_the-improvement-of-us-myanmar-relations.pdf](http://isdpeu/content/uploads/publications/2010_song_the-improvement-of-us-myanmar-relations.pdf)

### **Internet**

*Bush announces more Burma sanctions,*" diakses pada, [http://www.usatoday.com/news/washington/2007-10-19-burma-sanctions\\_N.ht](http://www.usatoday.com/news/washington/2007-10-19-burma-sanctions_N.ht),

*China's rise and role in the Asia-Pacific* diakses pada, <http://www.straitstimes.com/opinion/chinas-rise-and-role-in-the-asia-pacific>

Presidential Documents. *Blocking Property and Prohibiting Certain Transactions Related to Burma, Executive Order 13448*

*Overview of Burma Sanctions* diakses pada, <http://news.bbc.uk/2/hi/asia-pacific/8195956.stm>

*The Ban on Burma Ruby and Jade: Latest News*Diakses pada,<https://www.ajsgem.com/articles/ban-burma-ruby-and-jade-latest-news.htm>

*The United States Lifts Economic Sanctions on Myanmar*diakses pada, [http://www.willkie.com/~media/Files/Publications/2016/10/The\\_United\\_States\\_Lifts\\_Economic\\_Sanctions\\_on\\_Myanmar.pdf](http://www.willkie.com/~media/Files/Publications/2016/10/The_United_States_Lifts_Economic_Sanctions_on_Myanmar.pdf)

*Uprising in Burma Saffron Revolution in Burma* diakses pada, <http://burmacampaign.org.uk/about-burma/2007-uprising-in-burma/>

*US sanctions on Myanmar lifted but other restrictions remain* diakses pada, <http://sanctionsalert.com/us-sanctions-on-myanmar-lifted-but-other-restrictions-remain>